

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Penelitian ini mengawali kajian oligarki dalam dinamika pemilihan kepala desa. Salah satu motif yang mendorong penelitian ini keinginan memahami penggunaan simbol kekuasaan Jawa yakni sumber kekuasaan non-material bersifat spiritual (*spiritual power*) dan sumber kekuasaan material (*material power*) dalam proses demokrasi modern di pedesaan Jawa. Studi ini berusaha menjawab permasalahan utama yaitu bagaimana konfigurasi penggunaan sumber daya kekuasaan di pemilihan kepala desa. Sebagai sebuah fenomena politik, konfigurasi sumber daya kekuasaan di setiap desa mungkin tidak sama, dan bisa berbeda sesuai dengan konstelasi politik yang berkembang dalam pemilihan kepala desa.

Ditinjau dari perspektif historis, desa di Jawa sejak zaman prakolonial telah mengalami akulturasi berbagai budaya, dan termasuk pengaruh beberapa agama di antaranya Hindu, Budha, Islam, dan Kristen. Dalam perkembangannya perubahan sosial-budaya pedesaan Jawa, juga dipicu munculnya kebangkitan gerakan Islamisasi di pusat-pusat kerajaan Jawa di Jawa Tengah dan Jawa Timur, tetapi tidak serta merta menghilangkan budaya pra Hindu-Budha, atau bahkan melebur menciptakan apa yang disebut dengan sinkretisme.<sup>1</sup> Seringkali seorang penguasa Jawa khususnya di

---

<sup>1</sup> Sinkretisme adalah suatu gerakan yang melahirkan suatu keharmonisan filsafat atau hal-hal yang berhubungan dengan ke-Tuhanan yang bertentangan atau berbeda. Lihat, Dagebert D. Runes, *the Dictionary of Philosophy* (U.S.A: Philosophical Library). Dalam filsafat Jawa seseorang baru dianggap sebagai penguasa yang hebat apabila ia dapat menyerap hal-hal yang saling bertentangan. Hal tersebut dapat dilihat dalam bentuk arca ardhinari yang menggambarkan gabungan fisiologis perempuan di sebelah kiri dan laki-laki di sebelah kanan. Citraan ardhinari mengekspresikan vitalitas sang penguasa, ke-satuannya dan kepusat-annya. Benedict R.O'G. Anderson, *Kuasa-Kata Jelajah Budaya-Budaya Politik Indonesia* (terj). Yogyakarta: Mata Bangsa, 2000. Hal 59-60. Lihat Juga Isbodroini Suyanto, *Faham Kekuasaan Jawa: Pandangan Elit Kraton Surakarta dan Yogyakarta*. Disertasi, Program Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia, Depok, 2002

pedesaan masih menggunakan simbol kekuasaan menurut budaya Jawa yang berasal akulturasi kepercayaan Hindu-Budha dengan Islam.

Simbol kekuasaan Jawa digunakan dalam pemilihan kepala desa, identik dengan kekuasaan menurut budaya Jawa. Studi ini menggunakan unit analisis lainnya yakni kekuasaan oligarki untuk menjelaskan dinamika pertarungan politik di pedesaan. Hal ini disebabkan kontestasi Pilkades telah menjadi isu ekonomi politik menonjol di pedesaan Jawa, apalagi dengan adanya biaya politik tinggi, sumber ekonomi berupa tanah kas desa *bengkok*, dana desa, dan gengsi sosial jabatan kepala desa. Lantas, mendorong keterlibatan keluarga oligarki kaya, penjudi, dan tim sukses dari kelompok elite desa. Oleh karena itu, selain penggunaan simbol kekuasaan Jawa yang merupakan perekat politik secara kultural masyarakat pedesaan, terdapat variasi lain berupa pemberian politik uang, barang, dan jasa.

Pemilihan pemimpin di desa menjadi sesuatu yang penting berdasarkan asumsi bahwa sebenarnya di desa telah lama berlangsung kehidupan yang demokratis. Di antaranya adalah aktivitas musyawarah, rembug desa, proses pemilihan kepala desa, proses penetapan kebijakan desa, proses kepemimpinan desa, berkembangnya situasi yang melahirkan elite-elite politik desa, interaksi antara pemerintah desa dengan masyarakat, partisipasi masyarakat dalam berbagai proses pemerintahan merupakan aktivitas-aktivitas yang sudah ada di desa sejak lama dan dianggap menjadi gambaran demokratisasi desa. Jadi desa dapat dikatakan sebagai entitas demokratis yang memiliki kekuatan otonom dalam menyelenggarakan pemerintahan secara mandiri sesuai dengan kehendak dan kebutuhan yang diformulasikan oleh warganya sendiri. Desa adalah sebuah masyarakat demokrasi, sebuah masyarakat yang mendasarkan diri pada kedaulatan rakyat.<sup>2</sup> Terminologi desa atau sebutan lainnya seperti nagari, marga,

---

<sup>2</sup> Soetarjdo Kartohadikoosumo, *Desa* Jakarta: Balai Pustaka. Tahun 1964

kampong, dusun, dan dati, merupakan sebuah komunitas adat dan sebagai unit pemerintahan terendah dalam struktur pemerintahan Indonesia. Demokrasi desa menarik untuk dijadikan bahan kajian, desa memiliki karakteristik tersendiri dari segi sosial, budaya, politik dan ekonomi, berbagai warisan kearifan lokal kebudayaan Jawa berasal dari leluhur yang masih banyak ditemukan desa-desa di Jawa.

Di pedesaan Jawa eksistensi budaya pra-Hindu-Budha dan budaya Hindu-Budha yang berkembang sebelum datangnya Islam, terlihat masih berpengaruh di kalangan orang Jawa yang tinggal di desa. Indikasinya, masih banyak keluarga-keluarga yang meletakkan *sesajen* dalam rumah pada hari Jumat Kliwon, melakukan berbagai *slametan* dalam menghormati seseorang yang telah meninggal, percaya pada roh-roh halus, atau pergi ke makam-makam para leluhur dan pergi ke tempat-tempat yang dianggap keramat, penjelasan di atas termasuk beberapa contoh saja. Perkembangan Islam di beberapa tempat di pulau Jawa, merupakan lapisan luar dari keyakinan agama yang dianut oleh sebagian orang Jawa karena berbagai tradisi dalam budaya Jawa tidak hilang dengan datangnya Islam.<sup>3</sup> Paradigma kekuasaan Jawa dilihat dari sisi kepemimpinan Jawa juga bersifat sinkretis, artinya konsep-konsep yang diambil adalah berasal dari berbagai agama yang memiliki pengaruh akulturasi budaya di Jawa, khususnya Islam dan Hindu. Dengan demikian, penggunaan simbol-simbol Islam dan gagasan kekuasaan Jawa tidak hanya dalam kehidupan sosial sehari-hari, tetapi juga merambah kehidupan politik yakni saat kontestasi memilih pemimpin desa.

Ditinjau dari aspek sejarah, pemilihan di desa merupakan lembaga yang sudah lama yang diperkenalkan oleh Raffles, yakni selama pemerintahan peralihan Inggris pada awal abad kesembilan belas (1811-1816). Jadi Pilkades juga merupakan bagian

---

<sup>3</sup> Isbodroini Suyanto, *op.cit* hal 23

penting penyelesaian ketegangan politik dan ekonomi di pedesaan. Siapa pun yang menjadi kepala desa dapat menentukan tanah *bengkok* yang biasanya bernilai ekonomis tinggi karena luas dan subur, dapat menangani situasi politik di desa dan menuai segala jenis keuntungan dari kedudukannya yang berpengaruh; ia menerima sebagian dari pajak yang dikumpulkan; jika ada tanah yang dijual atau disewa ia menerima sejumlah prosentase, dan setiap sapi atau kerbau yang disembelih ia harus diberi sepotong daging. Pendek kata, kepala desa merupakan orang yang terkemuka dan beruntung.<sup>4</sup>

Dari aspek yuridis, perkembangan demokrasi desa sejak awal kemerdekaan dimulai sejak ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 hingga Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 di mana desa belum menjadikan daerah yang benar-benar otonom. Demikian juga desa sebagai kesatuan masyarakat yang diakui memiliki hak mengatur rumah tangganya sendiri. Salah satu alasan yang dapat dikemukakan yaitu situasi politik nasional yang masih dalam suasana revolusi dan masih rawan terjadinya pemberontakan di daerah. Pergolakan politik dalam negeri pasca 1965 atau lebih tepat disebut rezim Orde Baru terjaga lebih kondusif, indikatornya adalah stabilitas keamanan yang menjadi ciri khas Orde Baru pada saat itu mampu menciptakan Indonesia sebagai negara kondisi politik stabil. Namun, pembangunan yang gencar dilakukan Orde Baru justru mengkebiri perwujudan desa sebagai daerah otonom. Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang khas dan diakui haknya belum juga terjadi melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979. Negara menggunakan desa untuk kepentingan politik dengan slogan stabilitas dan harmoni, melalui penyeragaman pemerintah desa telah menghilangkan kearifan lokal desa karena adat istiadat desa.

---

<sup>4</sup> Frans Husken dalam Hans Antlov dan Sven Cederroth, *Kepemimpinan Jawa Perintah Halus, Pemerintahan Otoriter*, Jakarta: Yayasan Obor, 2001, hal 165

Setelah runtuhnya rezim Orde Baru, muncul tuntutan reformasi di segala bidang pemerintahan mencuat ke permukaan. Keberanian masyarakat desa semakin tinggi dengan tuntutan penerapan *Good Governance* semakin sering dikumandangkan. Salah satu harapan kelahiran maupun implementasi dari Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan desa. Menurut Ryaas Rasyid<sup>5</sup> antara lain, “Pemerintahan Desa harus dikembalikan kepada bentuk aslinya yang disebut *self-governing community*”. Pemerintahan Desa sebaiknya bukan merupakan pemerintahan pada level administratif yang paling rendah tetapi sebagai lembaga tradisional Desa. Pada akhirnya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 pemberlakuannya berumur singkat, atau hanya lima tahun. Sehingga dipandang belum efektif memperbaiki proses kebijakan penataan daerah di Indonesia, apalagi baru berumur lima tahun (UU. No. 22 Tahun 1999) tiba-tiba peraturan ini diganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.<sup>6</sup>

Kehadiran Undang-Undang baru tersebut setelah reformasi pada tahun 1998 memang telah mengubah peraturan tentang desa yang sebelumnya sentralitis menjadi perluasan otonomi desa atau desentralisasi, gejolak perubahan Undang-Undang tentang pemerintahan desa tingkat nasional pada akhirnya berimbas pada perubahan politik di tingkat pedesaan. Tuntutan otonomi desa dimulai hampir satu dekade reformasi (UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 32 Tahun 2004) masih berlanjut dengan muncul kebijakan paling baru penataan desa pada tahun 2014 (UU No. 6 Tahun 2014) yang berusaha kembali mengangkat hak dan kedaulatan desa, karena selama ini terpinggirkan karena didudukkan pada posisi sub nasional. Demikian perjalanan pasang-surut otonomi pemerintahan desa, terdapat peran dan segala

---

<sup>5</sup> Purwo Santoso,( Ed.),*Pembaharuan Desa Secara partisipatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003,hal, 26.

<sup>6</sup> Tumpal P Saragi. *Mewujudkan Otonomi Masyarakat Desa Alternatif Pemberdayaan Desa*. Jakarta: CV Cipruy. Tahun 2004. hal 358

kepentingan politik elite di Jakarta. Pada tabel di bawah ini dapat dilihat dinamika peraturan yang mengatur tentang kondisi sosial dan politik di desa.

**Tabel 1.1**  
**Berbagai Perspektif Undang-Undang Desa Tahun 1854 - 2014**

Periodisasi	Peraturan	Kebijakan Terkait Desa
Kolonial	Regeringsreglement (RR) Tahun 1854 Pada Pasal 71	Tentang kepala desa dan pemerintahan desa
	Tahun 1906 dikeluarkan Inlande Gemeente Ordonantie (IGO)	Peraturan dasar tentang desa khusus Jawa dan Madura
	Tahun 1944 dikeluarkan Osamu Seirei No. 7	Mengatur dan mengubah pemilihan kepala desa ( <i>Kutyoo</i> ) yang menetapkan masa jabatan kepala desa 4 tahun
Orde Lama	UUD 1945 Pasal 18	Pemerintah Indonesia memberikan pengakuan terhadap kedudukan dan keberadaan desa
	Undang-Undang No. 22 Tahun 1948	Mengarahkan desa dan kota kecil negeri, marga dan sebagainya menjadi daerah otonom tingkat III
	Undang-Undang No. 01 Tahun 1957	Mengatur tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah, tidak mengatur tentang desa akan tetapi mengatur tentang kemungkinan dibentuknya daerah otonom tingkat III
	Undang-Undang No. 19 Tahun 1965	Tentang Desapraja
Orde Baru	Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 Tentang Pemerintah Daerah	Hubungan Pemda atau desa sangat tergantung kepada pemerintah pusat
	Undang-Undang No.5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa	Masa Jabatan Kades dibatasi 16 tahun, Undang-Undang cenderung sentralisasi dan melarang aktivitas politik di tingkat desa
Reformasi	Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah	Masa Jabatan Kades dibatasi 10 tahun, otonomi desa (BPD) seluas-luasnya
	Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah	Memuat beberapa pokok pemikiran tentang pemerintahan desa
	Undang-Undang No. 06 tahun 2014 Tentang Desa	Mengatur Tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak

Sumber: Olahan Penulis, 2017

Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa mengatur pelaksanaan Pilkades secara serentak sehingga pemilihan pemimpin desa dilaksanakan serentak di Kabupaten Kediri, selanjutnya studi ini mengambil lokasi dua desa di Kabupaten Kediri. Pemerintah Kabupaten Kediri (Pemkab Kediri) telah melaksanakan Pilkades serentak pada Rabu, 28 Desember 2016. Kegiatan Pilkades sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2015 tentang Pilkades, ada pula landasan hukum lainnya yakni Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2016 tentang petunjuk pelaksanaan Perdanya. Proses pelaksanaan Pilkades Serentak dijelaskan oleh Kepala BPMPD<sup>7</sup> Kabupaten Kediri Satirin di bawah ini.

“Acuan Perda dan Perbup itu menjadi payung hukum pelaksanaan pesta demokrasi di 61 desa. Di akhir tahun nanti (28 Desember 2016), para warga di desa-desa itu akan memilih kandidat pemimpin desanya.”<sup>8</sup>

Berdasarkan amanat peraturan di atas pada tanggal 28 Desember 2016, Pilkades serentak dilaksanakan 61 desa Kabupaten Kediri. Untuk kepentingan studi ini, peneliti mengambil lokasi di Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri, dan hanya dua desa yang mengikuti Pilkades serentak tahun 2016 di Kecamatan Pagu (Sitimerto dan Tanjung). Berdasarkan pertimbangan kedua desa ini masih ditemukan kuatnya warisan budaya Jawa, apalagi terdapat situs sejarah Kerajaan Kediri yakni petilasan Sri Aji Joyoboyo dan Sendang Tirto Kamandanu. Dalam sejarah dikenal sebagai Raja Kediri pada abad XII, Raja Joyoboyo juga terkenal dengan kitab “Jongko Joyoboyo” yang berisi ramalan-ramalan kejadian di masa yang akan datang.

Situs budaya Jawa petilasan ini teletak di antara desa Sitimerto dan desa Tanjung, dan setiap awal tahun baru Islam dan Jawa (1 *suro*) bisa ditemukan kuatnya tradisi budaya yang diwariskan oleh para leluhur masyarakat Jawa melalui berbagai

---

<sup>7</sup> Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

<sup>8</sup> <http://radarkediri.jawapos.com> diakses 22 Juni 2016.

kegiatan diantaranya *slametan*, bersih desa, *tayuban* dan wayang. Selain aspek sosial-budaya, kuatnya tradisi Jawa juga ditemukan pada ranah politik di pedesaan, seperti setiap menjelang Pilkada semua calon kepala desa berbondong-bondong mengunjungi situs budaya tersebut sebagai upaya legitimasi kekuasaan kultural Jawa, yang bersifat kekuasaan spiritual (*spiritual power*) atau simbol kekuasaan Jawa.

Praktik eksploitasi simbol-simbol kekuasaan Jawa dalam rangka mencari legitimasi penguasa desa, relevan dengan perspektif nilai-nilai tradisional yang hidup dalam *image* kultural masyarakat khususnya di pedesaan. Sebagai contoh *image* tentang *pulung* – ini menjadi penanda bagi seseorang berhak atau tidak sebagai penerus dari pemimpin terdahulu, apabila tidak punya tanda kekuasaan tersebut, menurut kepercayaan calon pemimpin harus melalui *laku* seperti tapa brata atau semedi ke tempat-tempat wingit. Adapun sebagai pelengkap tanda kekuasaan lainnya, maka dibutuhkan kepemilikan pusaka yang mempunyai kemampuan mistik untuk memperkuat kekuasaan spiritual seorang pemimpin Jawa.

Dalam sejarahnya *laku* juga dilakukan oleh Pangeran Dipenogoro dalam perang Jawa, itu memenuhi kebutuhan akan keabsahan sebagai penguasa Jawa bersifat spiritual. Keyakinan masyarakat Jawa, gelar dan kelengkapan kebangsawanan harus dilengkapi dengan penguasaan spiritual. Untuk itu, sebelum memberontak terhadap Belanda, ia memilih berziarah ke tempat-tempat suci, makam-makam orang suci dan penguasa-penguasa terdahulu, sama seperti yang dilakukan Sultan Agung. Dalam perjalanan itu, ia sering berdoa dan bertapa. Kegiatan bertapa, dulu dan sekarang, dalam budaya Jawa selalu dihubungkan dengan pengumpulan kekuatan magis.<sup>9</sup>

Fenomena pengumpulan kekuatan magis ditinjau dari konsep kekuasaan Jawa menurut Moertono, adalah hubungan penguasa dan rakyat dalam pemikiran politik

---

<sup>9</sup> Michael Adas, *Ratu Adil: Tokoh dan Gerakan Milenarian Menentang Kolonialisme Eropa*. Jakarta: Rajawali Press, 1988, hal 252-253



Jawa tradisional dapat dimakanai dengan konsep hubungan *kawula-gusti*. Kekuasaan dan kepemimpinan pada masa lalu bersumber pada raja sebagai penguasa kerajaan. Bahwa negara atau kerajaan bisa dianggap sebagai pranata sosial, tempat manusia melalui upaya bersama berusaha mencapai tujuan-tujuan tertentu. Untuk itu, diperlukan sejumlah tata cara mengatur dan mengkoordinasi, maka harus diperhitungkan dua unsur penting dalam organisasi, yaitu pengurus/pengatur (organisator) dan yang diatur/diurus, pemimpin dan pengikut, dalam istilah tradisional Jawa, hubungan *kawula-gusti* (hamba dan tuan).<sup>10</sup>

Moertono menjelaskan kehidupan tradisional orang Jawa bukan hanya bersifat antara hamba dan tuan, sebaliknya hubungan ini lebih merupakan ikatan pribadi dan akrab, saling hormat dan bertanggung jawab. Secara ideal, hubungan ini seperti kasih sayang dalam ikatan keluarga. Penjelasaannya, konsep *kawula-gusti* sangat diwarnai oleh ciri lain pemikiran Jawa; suatu kepercayaan yang tidak tergoyahkan oleh nasib, akan hal-hal yang sudah ditakdirkan (*tinitah*), yang dinyatakan dalam *pinesti* (ditentukan), atau takdir (bahasa Arab). Ada dua lapisan utama masyarakat Jawa, yakni *wong cilik* (orang biasa) dan *penggede* (golongan penguasa), terutama dari segi kekayaan ekonomis atau keunggulan, yang membentuk pertuanan dan perhambaan dari segi *kawula* (hamba) terhadap *bendara* (tuan).<sup>11</sup>

Hubungan penguasa dan rakyat dalam kebudayaan Jawa berbeda dengan relasi konsep kekuasaan seperti yang dipahami dan digunakan di Barat. Seperti diungkapkan Anderson dalam menjelaskan konsep kekuasaan Jawa, Anderson mengontraskan dengan konsep kekuasaan Barat berdasarkan beberapa kriteria, yaitu abstrak tidaknya kekuasaan, sumber-sumber kekuasaan, jumlah kekuasaan, dan

---

<sup>10</sup> Soemarsaid Moertono, *Negara dan Usaha Bina Negara di Jawa Masa Lampau, Studi tentang Masa Mataram II, Abad XVI sampai XIX*, Jakarta: Cornell Modern Indonesia Project (terjemahan Yayasan Obor Indonesia), 1985, hal. 17

<sup>11</sup> *Ibid*, hal. 17-19.

moralitas kekuasaan. Karakteristik kekuasaan Jawa (*kesakten*) sangat bertolak belakang dengan kekuasaan Barat.<sup>12</sup>

*Pertama*, menurut Anderson kekuasaan itu konkret. Sehingga bagi orang Jawa, kekuasaan itu ada, terlepas dari orang yang mungkin mempergunakannya. Kekuasaan bukan suatu anggapan teoretis, melainkan suatu realitas yang benar-benar ada. Kekuasaan adalah daya yang tidak bisa diraba, penuh misteri, dan bersifat ketuhanan yang menghidupkan alam semesta. Kekuasaan terwujud dalam setiap aspek dunia alami, pada batu, kayu, awan, dan api.

*Kedua*, menurut Anderson kekuasaan itu homogen. Dari konsepsi ini timbul pendapat bahwa semua kekuasaan itu sama jenisnya dan sama pula sumbernya. Kekuasaan di tangan satu individu atau satu kelompok adalah identik dengan kekuasaan yang ada di tangan individu atau kelompok lain manapun. *Ketiga*, menurut Anderson pandangan orang Jawa, alam semesta tidak bertambah luas dan tidak pula bertambah sempit. Demikian pula jumlah kekuasaan yang terdapat di dalamnya selalu tetap.

*Keempat*, kekuasaan tidak mempersoalkan keabsahannya. Karena semua kekuasaan berasal dari sumber tunggal yang homogen, maka kekuasaan itu sendiri lebih dahulu ada daripada masalah-masalah baik-buruk. Menurut cara pemikiran orang Jawa, menuntut hak berkuasa berdasarkan sumber-sumber kekuasaan yang berbeda-beda tidak akan ada artinya. Bagi orang Jawa itu tidak relevan dipertanyakan. Sebab, “kekuasaan tidak absah dan bukan pula tidak absah. Yang penting kekuasaan itu ada”.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Ramlan Surbakti. *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Grasindo, 1992, hal 102

<sup>13</sup> Benedict R.O’G. Anderson, *Kuasa-Kata Jelajah Budaya-Budaya Politik Indonesia* (terj). Yogyakarta: Mata Bangsa, 2000. Hal 59-60. Lihat juga Fachry Ali. *Refleksi Paham Kekuasaan Jawa Dalam Indonesia Modern*, Jakarta: Gramedia Pustaka Tama, 1986, hal 24

Penjelasan Anderson tentang karakteristik kekuasaan Jawa tersebut, dielaborasi lagi dengan studi terbaru Isbodroini, yang memfokuskan kepada pemikiran politik Jawa elite Keraton setelah reformasi. Beberapa kesimpulan Isbodroini adalah yakni kekuasaan Jawa tidak mempersoalkan keabsahan karena semua kekuasaan berasal dari sumber tunggal yang homogen, selain itu kekuasaan dalam pemikiran politik Jawa tradisional tidak mempunyai implikasi-implikasi moral yang inheren. Isbodroini dan Anderson juga mempunyai pandangan yang sama, yaitu sumber kekuasaan dalam konsepsi politik Jawa tradisional adalah raja, sebagai pusat kosmis dan mistis. Isbodroini menambahkan dalam konsepsi politik Jawa tradisional, sumber kekuasaan selain pada pribadi raja, juga pada *ngelmu kasampurnaan*, perkawinan (genealogis) dan *regalia* (simbol-simbol).<sup>14</sup>

Pendapat Anderson dan Isbodroini tentang konsep kekuasaan Jawa yang identik dengan '*kesakten*', mendapat kritik dari Kontjaraningrat dan Suko Sosilo. Menurut Koentjaraningrat pemahaman tentang kekuasaan Jawa akan sesat apabila mengira orang Jawa menganggap kekuasaan identik dengan suatu energi sakti yang dapat diraih dengan upacara dan bertapa. Konsepsi orang Jawa mengenai kekuasaan dan kepemimpinan jauh lebih kompleks. Konsepsi orang Jawa mengenai kekuasaan sebagai kekuatan energi sakti dan keramat itu juga tidak lain dari suatu konsepsi simbolis belaka.<sup>15</sup>

Suko Susilo mengkritik konsep kekuasaan Jawa Anderson dan Isbodroini dalam penelitian tentang elite lokal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Kota Kediri, secara khusus mengkritik pernyataan Anderson bahwa konsep *kesakten* telah gagal menjelaskan kekuasaan Jawa secara universal, karena menurut Suko Susilo semua

---

<sup>14</sup> Dikutip dari Isbodroini Suyanto, *Faham Kekuasaan Jawa: Pandangan Elit Kraton Surakarta Dan Yogyakarta* (Disertasi), 2002, hal. 16

<sup>15</sup> Meriam Budiardho, *Aneka Pemikiran Tentang Kuasa dan Wibawa*. Jakarta: Sinar Harapan, 1984, hal 129

kekuasaan baik kekuasaan Jawa maupun kekuasaan Barat pasti memiliki implikasi moral.<sup>16</sup>

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kediri, dengan mengambil lokasi dua desa yang mempunyai karakter budaya Jawa. Salah satu pertimbangannya adalah penggunaan simbol kekuasaan Jawa dapat ditemukan di pemilihan kepala desa, berdasarkan penelitian awal hampir semua calon kepala desa yang bertarung dalam kontestasi Pilkades desa Sitimerto dan desa Tanjung menggunakan simbol kekuasaan Jawa, berupa mengerahkan ilmu gaib atau ilmu hikmah yang mereka miliki, atau setidaknya menyimpan pusaka, jimat, dukun, dan ziarah kubur (*pesarean*). Para kandidat kepala desa melakukannya untuk membantu tercapainya kemenangan dalam pemilihan kepala desa.

Para calon kepala desa menggunakan simbol kekuasaan Jawa dalam Pilkades, hal ini terpengaruh budaya pra-Hindu-Budha dan budaya Hindu-Budha yang berkembang sebelum datangnya Islam. Pengaruh budaya Jawa bisa ditemukan di dusun Balekambang desa Tanjung yang menjadi lokasi disertasi ini. Beberapa tradisi turun-temurun masyarakat dusun Balekambang terutama komunitas keluarga-keluarga masih meletakkan *sesajen* dalam rumah pada hari Jumat Kliwon, melakukan berbagai *slamaten* dalam menghormati seseorang yang telah meninggal, percaya pada roh-roh halus, dan saat dilakukan bersih desa semua warga desa dilarang beraktivitas kerja karena takut kesurupan.

Di desa Tanjung juga terdapat *Tayuban* dan wayang kulit yang merupakan kesenian Jawa tradisional, yang cukup unik untuk pendanaan kegiatan kesenian Jawa tersebut, terdapat warga tergolong miskin tidak keberatan ditarik sumbangan lima puluh ribu rupiah. Desa ini juga terdapat tiga *punden* atau makam yang dianggap

---

<sup>16</sup> Suko Susilo, "Pemahaman Elite PKB Kota Kediri Tentang Kekuasaan Politik: Studi Tentang Pemahaman Kekuasaan Politik dari Perspektif Konstruksionisme". Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2005

tempat keramat yakni Mbah Ageng Gindo, Mbah Wonokarso, dan Mbah Prabu Kiai Papak, yang saat menjelang pemilihan kepala desa kemarin dikunjungi oleh para calon kepala desa. Sementara itu desa Sitimerto hanya terdapat satu punden yaitu Ki Ageng Selo yang dipercayai sebagai makam pendiri desa, ketika menjelang Pilkades kemarin ramai dikunjungi kandidat untuk kegiatan ziarah atau *slametan*.

Pada penelitian awal terbukti mayoritas calon kepala desa (Sitimerto dan Tanjung) menggunakan simbol kekuasaan Jawa dalam kontestasi politik modern. Terkait penggunaan simbol kekuasaan Jawa dalam mekanisme politik modern tersebut, analisis Surbakti diawali mengajukan pertanyaan, apakah secara empiris kekuasaan itu ada dan terjadi dalam proses politik atau tidak? Salah satu jawaban yang diberikan terhadap pertanyaan ini ialah masalahnya bukan ada atau tidak ada tetapi apakah masih banyak anggota masyarakat Jawa, baik para pemimpin atau rakyat biasa, yang memahami kekuasaan dalam arti *kesakten*. Kalau masih banyak, setidaknya-tidaknya paham kekuasaan Jawa dapat digunakan oleh penguasa sebagai sarana pembenaran atas kekuasaan yang diperoleh bukan dengan cara-cara yang digambarkan menurut budaya Jawa, tetapi dengan cara-cara menurut budaya Barat.<sup>17</sup>

Pemahaman masyarakat desa dan calon kepala desa tentang kekuasaan Jawa berfungsi memenangkan peristiwa Pilkades di Desa Tanjung dan Desa Sitimerto. Tetapi, apakah dukungan masyarakat desa terhadap calon kepala desa saat Pilkades hanya bertumpu legitimasi spiritual atau simbol kekuasaan Jawa? Mengingat pedesaan Jawa atau khususnya Kediri telah mengalami perubahan sosial akibat penetrasi pertanian kapitalis sejak pascakolonial. Apalagi, kebijakan politik terbaru di tingkat desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,

---

<sup>17</sup> Ramlan Surbakti, *Op.Cit* hal, 106

mengatur pelaksanaan pemilihan kepala desa (selanjutnya disebut pilkades) yang dilakukan secara serentak.

Pemilihan kepala desa sendiri tidak dapat dilepaskan dari perkembangan sumber-sumber kekuasaan ekonomi dalam dinamika politik yang terjadi di desa. Karena kontestasi politik desa juga merupakan perebutan kekuasaan sebagai unjuk kekuatan ekonomi yang menjadi basis sumber kekuasaan yang bersifat oligarki. Sehingga pemilihan kepala desa bukan hanya solusi ketegangan politik elite desa, juga terdapat gengsi sosial, harga diri, unjuk kekuatan ekonomi para calon kepala desa yang bertarung dalam pemilihan kepala desa. Oleh karena itu pertarungan politik pedesaan Jawa telah berlangsung lama sejak Orde Lama.

Pada masa Orde Lama pembahasan perspektif ekonomi politik mengenai pertarungan politik di pedesaan Jawa pascakolonial digagas oleh Wertheim<sup>18</sup> yang menandakan hubungan antara perubahan-perubahan struktur sosial-ekonomi dan pertumbuhan ketegangan antara bentuk politik patronase dan bentuk politik kelas. Ia setuju pemisahan kelas di pedesaan belum tajam digariskan dan organisasi politik terpaksa dibentuk melalui jaring-jaring klien-patron, tetapi ia juga mengajukan pendapat bahwa penyebaran kapitalisme di pedesaan di tahun 1950-an dan 1960-an telah memantapkan bentuk identitas kelas yang lebih tegas dan mulai mendobrak perlindungan yang pada mulanya tersedia kepada kaum miskin dan papa berkat lembaga-lembaga tua komunal desa dan patronase.

Pada saat Orde Lama, pengesahan Undang-Undang pembagian tanah pada tahun 1960 telah memberikan harapan pada kaum tani akan pembagian tanah, mendorong serikat taninya PKI (BTI) untuk mengambil pimpinan dalam politik kelas yang sudah berkembang, dan memaksa tuan tanah mengambil tindakan politik guna

---

<sup>18</sup> Wertheim, *From Aliran to Class Struggle in the Countryside of Java*, PACIFIC VIEWPOINT, 10 (1969), hal 1-17. Lihat juga Richard Robison, *Culture, Politics and Economy in the Political History of The New Order*. Cornell Southeast Asia Program, Ithaca, New York 31(22), April 1981

mempertahankan kedudukan kelas mereka. Dalam hal ini lokasi Kabupaten Kediri juga merupakan salah satu basis pendukung PKI terdapat pembunuhan massal pada tahun 1965.

Selanjutnya pada Orde Baru, Robison menganalisis pemunculan suatu kelas kulak dapat diduga akan membawa perubahan-perubahan fundamental di dalam hubungan-hubungan politik di dalam kehidupan pedesaan dan antara pedesaan dan negara. Hubungan antara petani dengan buruh upah terutama akan bersifat ekonomis dan kontrakan, semakin terpisah dari hubungan politik dan sosial. Jaringan patron-klien tidak akan memadai untuk dapat mengamankan sarana-sarana politik dan ekonomi antara kelas-kelas di pedesaan dan bagi hubungan struktural antara kelas-kelas pedesaan dengan negara. Suatu borjuasi agrarian yang kuat dengan bersandar kepada kekuasaan ekonomi dan sosial yang independen berupa kepemilikan modal akan menyadari bahwa kepentingan mereka sebagai suatu kelas hanya bisa dijamin oleh kebijaksanaan negara dan penanaman modal, dari pada melalui belas kasih pribadi dari seorang penguasa setempat.<sup>19</sup> Hal ini menyebabkan munculnya kelas tuan tanah yang disebut kelas kulak.

Analisis Robison tentang kemunculan kelas *kulak* dan sistem buruh upah juga terjadi di Kediri, apalagi sejak pertengahan dekade 1960-an sampai sekarang merupakan masyarakat pertanian dengan lanskap kultural Jawa. Posisi Kediri terletak sekitar 25 kilometer dari jalan raya utama yang menghubungkan Jombang ke Surabaya dan Madiun di kawasan barat Jawa Timur. Meskipun demikian, di Keresidenan Kediri terdapat sejumlah pabrik gula (PG) dan sebuah pabrik rokok

---

<sup>19</sup> Richard Robison, *Culture, Politics and Economy in the Political History of The New Order*. Cornell Southeast Asia Program, Ithaca, New York 31(23), April 1981

terbesar di Indonesia, PT Gudang Garam. Dengan puluhan ribu pekerja, Kediri memiliki kehidupan ekonomi yang dianamis sekalipun agak terisolasi.<sup>20</sup>

Kediri merupakan wilayah pertanian yang menjadikan salah satu sentra penghasil tebu sebagai bahan baku gula. Pola relasi tata niaga industri tebu cenderung mengikuti pertanian kapitalis yang dibangun dikalangan petani, tuan tanah, dan pabrik tebu. Mereka, para buruh tani dan petani kecil berelasi dengan tuan tanah secara langsung berhubungan dengan sistem produksi tengkulak oleh tuan tanah. Penggunaan kerja upah, penyediaan kredit pedesaan, bibit padi unggul, obat anti hama, dan pupuk kimia telah menyediakan peluang bagi pemilik tanah menjadi petani kapitalis daripada menjadi tuan-tuan penarik sewa. Masyarakat desa di Kabupaten Kediri tampak jelas sekali sedang bergerak menuju ke pemusatan pemilikan tanah yang diiringi oleh polarisasi antara yang memiliki tanah dan yang tidak memiliki tanah.<sup>21</sup>

Hal ini menjadikan para tuan tanah sebagai elite ekonomi desa telah menjadi kekuatan politik dominan di desa Kabupaten Kediri, khususnya pebisnis tebu, ditandai dengan kemampuan dan pengaruh mereka dalam pengambilan keputusan kebijakan desa. Bahkan kekuatan ekonomi mereka juga sangat menentukan dalam pemilihan kepala desa. Karena hampir semua kandidat kepala desa terpilih merupakan figur-figur yang ditopang oleh kekuatan investor politik atau elite ekonomi itu sendiri yang maju menjadi kandidat kepala desa.

Keterlibatan pengusaha sebagai elite ekonomi desa di Pilkades semakin mendapatkan ruang dengan semakin tingginya biaya politik di desa, terlebih saat ini muncul dua kategori kepala desa atau lurah. *Pertama*, lurah *tulen*, kepala desa yang

---

<sup>20</sup> Hermawan Sulisty, *Palu Arit di Ladang Tebu Sejarah Pembantaian Massal yang Terlupakan*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, Tahun 2000. hal 97

<sup>21</sup> *Ibid*, hal. 23



memang hanya berprofesi sebagai birokrat. Mereka biasanya ditopang oleh investor politik dalam proses pemilihan kepala desa, dengan jaminan bengkok, proyek pembangunan desa, dan jabatan pamong desa. *Kedua*, ternyata tidak semua kepala desa di Kediri adalah lurah *tulen*, yang hanya mengandalkan jabatan birokrasi dan penghasilan pribadi dari status sebagai lurah tampaknya ada juga lurah yang memiliki status rangkap sebagai pengusaha. Dalam kapasitas sebagai pengusaha, tentunya mereka sangat berkepentingan untuk mendapatkan akses terhadap sumber daya (*resources*) yang didapat pengelolaan dana pembangunan desa (Dana Desa), apalagi jika tanah bengkok yang dimiliki desa tersebut sangat luas.

Selain faktor insentif ekonomi, posisi kepala desa adalah perwujudan gengsi status sosial, walaupun imbalan jabatan Kades belum tentu mengembalikan modal politik saat proses *macung*<sup>22</sup>. Beberapa tulisan media dan para peneliti sebelumnya mengungkapkan bahwa pilkades serentak di Kabupaten Kediri telah menjadi medan praktik demokrasi berbiaya tinggi (*high cost democracy*) yang bertaburan uang dan sembako bagi para warga desa.

Keterlibatan pengusaha dalam kontestasi Pilkades di Kabupaten Kediri terlihat terutama dalam pembiayaan sosialisasi, kampanye, dan berbagai upaya dalam menarik dukungan warga desa, atau dukungan kepada sosok pengusaha tersebut sendiri jika maju langsung sebagai calon kepala desa atau calon lain yang didukungnya. Masyarakat setempat mengakui, tanpa keterlibatan dan dukungan kuat pengusaha – khususnya kelompok oligarki – rasanya sulit bagi calon-calon kepala desa untuk mendapat dukungan warga desa. Bentuk imbalan atas hak atas tanah bengkok dan pengelolaan dana desa, oleh kepala desa terpilih menjadi faktor

---

<sup>22</sup> Macung adalah istilah orang bertarung dalam kontestasi pemilihan kepala desa

pendorong untuk memenangi kepala desa. Untuk lebih jelas terlihat dalam di tabel di bawah ini.

**Tabel 1.2**  
**Daftar Aset Tanah Desa Tanjung dan Desa Sitimerto Kecamatan Pagu**  
**Kabupaten Kediri**

NO	Tanah	Luas m2	Hektare	Harga Jual	Keterangan
1	Desa Tanjung	71850	7,18	2 Milyar	Bengkok Kades
		248550	24,85	6,7 Milyar	Bengkok Desa
		32650	3,26	1 Milyar	Kas Desa
2	Desa Sitimerto	42000	4,20	1,2 Milyar	Bengkok Kades
		109390	10,93	4,9 Milyar	Bengkok Desa
		10500	1,05	700 Juta	Kas Desa

Sumber: Perangkat Desa Tahun 2017

Berdasarkan tabel 1.2, sumber ekonomi berupa tanah bengkok bisa dikelola sendiri atau dijaminan kepada investor politik yang telah membiayai pencalonan sebagai kepala desa, melalui data aset tanah bengkok desa Tanjung dan desa Sitimerto cukup menjadikan lurah atau pamong desa sebagai kelompok elite desa yang memiliki tanah luas. Faktor lain status sebagai pejabat perangkat desa masih cukup menguntungkan, karena mempunyai gaji tetap atau status PNS (Sekdes) disamping manfaat pengelolaan hak atas tanah bengkok. Tanah yang dikelola desa biasa digunakan untuk bahan baku suplai industri bisnis tebu.

Tumbuhnya industri tebu di Kabupaten Kediri, dampak proses industrialisasi berdampak pemusatan pemilikan tanah dan perkembangan menuju sistem kerja-upah telah mempertajam pembagian kelas, memperlemah struktur klien-patron. Perkembangan ini telah didorong sejak pemerintah Orde Baru dengan program Bimas (Bimbingan Massal Swasembada Pangan) dan oleh sistem kredit Inpres (Instruksi Presiden). Lebih lanjut, tampak bahwa pejabat-pejabat pemerintah sendiri, dari kepala desa dan sersan tentara sampai bupati dan pejabat tinggi, tampil menjadi tokoh-tokoh

terkemuka kelas kulak.<sup>23</sup> Terlihat proses muncul kelas kaya (*kulak*) meruntuhkan hubungan patron-klien, dimulai menyebarnya pertanian kapitalis dan sistem buruh-upah. Ketika tuan tanah tidak lagi menggunakan tenaga kerja tradisional gotong-royong berdasarkan hubungan timbal-balik saling menguntungkan antara petani dan pemilik tanah tetapi cenderung menjadi oligarki, menguntungkan kepentingan sendiri dan kelompok-kelompok bisnisnya.

Hancurnya hubungan patron klien di desa bisa dijelaskan dengan teoretisi oligarki terkait relasi bisnis dan politik setelah reformasi Indonesia dipelopori oleh Robison dan Hadiz<sup>24</sup>, yang menjelaskan perubahan struktur politik-ekonomi, dari runtuhnya hubungan patron-klien menjadi oligarki yang menyebar ke daerah-daerah, kota-kota dan desa-desa. Oligarki bisa didefinisikan sebagai relasi kekuasaan di antara sekelompok orang yang menguasai sumber daya ekonomi dan politik untuk kepentingan sendiri. Lebih dari sekedar menguasai sumber daya ekonomi, kaum predator<sup>25</sup> ini juga berupaya melakukan penguasaan terhadap lembaga-lembaga politik sebagai instrumen untuk menjamin kelanggengan posisi mereka.

Adapun Winters,<sup>26</sup> menyatakan kekayaan adalah sumber daya kekuasaan yang mendefinisikan oligark dan menggerakkan politik serta proses oligarki. Sumber daya kekuasaan material menyediakan dasar untuk tegaknya oligark sebagai pelaku politik yang tangguh. Sumber daya material dalam berbagai bentuk (yang paling luwes

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hal. 12. Lihat juga Jim Hinkson, *Rural Development and Class Contradiction on Java*, Journal of Contemporary Asia (JCA), hal 327-336.

<sup>24</sup> Vedi R, Hadiz, *Dinamika Kekuasaan: Ekonomi Politik Indonesia Pasca Soeharto*. 2005, Jakarta: LP3ES, hal 177

<sup>25</sup> Yang dimaksud dengan istilah predatoris adalah aparat negara dan otoritas publik yang menjadi milik dari suatu korps birokrat-politik yang tujuan utamanya adalah kekayaan politik dan ekonomi mereka sendiri. Kehidupan ekonomi dikendalikan dengan penggunaan kekuasaan ketimbang ditata dengan aturan-aturan, dan lebih memikirkan alokasi daripada regulasi. Kekuasaan arbitrer dan represif digunakan untuk mendisorganisasikan *civil society*. *Ibid*, hal. 105. Lihat juga P Evans, *Embedded Autonomy: States and Industrial Transformation* (1995, Princeton: Princeton UP) hal. 44

<sup>26</sup> Jeffrey A. Winters, *Oligarki*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011, hal 27

adalah uang tunai) sudah lama dikenali sebagai sumber kekuasaan ekonomi, sosial, dan politik. Orang tidak jadi sama sekali tak berkuasa kalau tak punya kekayaan.

Oligarki juga hadir dalam kontestasi politik politik lokal sampai desa, terdapat empat analisis Hadiz mengenai konfigurasi elite politik lokal di Indonesia pasca Orde Baru. *Pertama*, jaringan elite Orde Baru mendominasi politik lokal melalui politik uang dan penggunaan berbagai instrumen mobilisasi politik dan intimidasi. *Kedua*, sebagian jaringan elite Orde Baru adalah birokrat tua yang kemudian bertransformasi ke politik praktis. *Ketiga*, elite yang semakin menonjol adalah pengusaha lokal, biasanya dulu memimpin bisnis kecil atau menengah, misalnya, dalam kontrak, perdagangan atau berbagai layanan, yang telah lama memiliki ambisi untuk naik tingkat. Oleh karena itu, desentralisasi menjadi ajang naik tingkatnya operator lokal jaringan predatoris Orde Baru. *Keempat*, jaringan preman yang sejak Orde Baru terlibat menjadi kekuatan politik juga berusaha mendapatkan sumber daya material dalam desentralisasi. *Kelima*, jaringan elite ini tersebar di dalam berbagai grup sebagai operator politik. Beberapa di antaranya muncul dari mahasiswa dan organisasi pemuda yang menerima atau setuju dengan politik Orde Baru.<sup>27</sup>

Berdasarkan analisis Winters, Robison dan Hadiz diatas, ciri mendasar operasional oligarki pada politik lokal dan keterlibatan kelompok oligarki juga bisa digunakan sebagai unit analisis dalam pemilihan kepala (desa Tanjung dan desa Sitimerto)<sup>28</sup>. Pada umumnya para calon kepala desa menggunakan politik uang berkisar mulai puluhan ribu hingga ratusan ribu disebar ke warga desa untuk memenangkan pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Kediri. Berdasarkan

---

<sup>27</sup> Vedi R, Hadiz. *Localizing Power in Post-authoritarian Indonesia A Southeast Asia Perspective*. 2010, California: Stanford University Press, hal 92-94

<sup>28</sup> Bagi masyarakat pedesaan, peristiwa Pilkades merupakan kontestasi politik yang emosional dibandingkan dengan pemilu lainnya (Pilkada, Pileg, dan Pilpres). Hal ini disebabkan masyarakat desa sering kali berinteraksi sosial langsung dengan calon-calon kepala desa yang harus mereka pilih. Pengetahuan tentang rekam jejak perilaku keseharian calon kepala desa menjadi pertimbangan dalam menentukan pilihannya, selain faktor materi yang nanti didapat jika memilih salah satu calon.

informasi awal terjadi fenomena menarik terkait politik uang, jika di desa Sitimerto pemberian politik uang terbesar yakni calon Adit begitu signifikan mendulang suara di desa Sitimerto. Namun, sebaliknya di Tanjung calon yang pemberian uang terkecil Vito justru mampu memenangkan Pilkades, padahal tidak mempunyai modal uang sama sekali sehingga banyak kader lawan yang menghina hanya modal kotor sapi “*macung kok modal teletong*”<sup>29</sup>. Vito hanya mampu menyebar politik uang Rp. 30.000 yang berasal dari patungan keluarga dan kader, apalagi ini nominal terkecil dari dua lawannya yang menyebar politik uang sebesar Rp. 100.000 sampai Rp. 150.000.

Untuk kontestasi di desa Sitimerto kepala desa terpilih Adit adalah putra dari Haji Mulyono, tuan tanah atau pengusaha yang disegani oleh penduduk desa Sitimerto. Pada periode sebelumnya jabatan kepala desa dipegang oleh ibunya (Tuti Harini merupakan istri Haji Mulyono) selama dua periode, sehingga Pilkades sebagai unjuk kekuatan ekonomi keluarga Haji Mulyono dengan menyebarkan politik uang paling besar, sembako, sumbangan bantuan renovasi Masjid, dan *slametan*<sup>30</sup>. Terlihat keluarga Haji Mulyono telah membangun dinasti politik di Desa Sitimerto dalam waktu cukup lama setelah reformasi. Penguasa tersebut mempunyai peluang yang besar dan muncul sebagai oligarki lokal desa. Seperti pendapat Hadiz<sup>31</sup> berkolaborasi dengan jaringan patronase untuk menguasai sumber daya ekonomi dan birokrasi untuk kepentingan diri sendiri. Untuk lebih jelasnya berikut ini hasil rekapitulasi suara di kedua desa tersebut.

---

<sup>29</sup> Wawancara Don Vito Gusbaki. 15 Agustus 2017 di Balai Desa Tanjung.

<sup>30</sup> Sebuah acara makan komunal religius di mana para tetangga ditambah beberapa kerabat ikut serta. Tujuan adalah mencapai keadaan slamet, yang pernah didiskripsikan Koentjaraningrat sebagai “sebuah keadaan di mana peristiwa-peristiwa mengikuti alur yang telah ditetapkan dengan mulus dan tak satupun kemalangan menimpa siapa saja”. Koentjaraningrat dalam Niels Mulder. *Mistisisme Jawa Ideologi Indonesia*, 2001, Yogyakarta: LKiS, hal 98

<sup>31</sup> Richard Robison dan Vedi R. Hadiz, *Reorganising Power in Indonesia, The Politics of Oligarchy in an Age of Markets*, RoulledgeCurzon, New York, 2004, hal. 247.

Tabel 1.3

## Rekapitulasi Suara Pilkades Sitimerto dan Pilkades Tanjung Tahun 2016

N O	DESA	JML DPT	No Urut	Nama Calon Kepala Desa	Surat Suara		Kehadiran
					Sah	Tidak Sah	
1	Sitimerto	1215	1	AGUNG	13	15	1093
			2	HARI	424		
			3	BASUKI	18		
			4	<b>ADIT</b>	<b>560</b>		
			5	ROHMAD	63		
2	Tanjung	3075	1	<b>VITO</b>	<b>1,477</b>	24	2849
			2	RUDI	505		
			3	AGUS	843		

Sumber: DPMPD Kab Kediri Tahun 2016

Berdasarkan tabel 1.3, Pilkades serentak tahun 2016 di Desa Sitimerto diikuti 5 calon kepala desa. Calon kepala desa nomor urut (1) Mulyo Agung dengan 13 suara, (2) Hari Puryanto dengan 424 suara, (3) Basuki dengan 18 suara, (4) Aditya Dimas Saputra unggul 560 suara, (5) Surohmad dengan 63 suara. Pihak pemenang Pilkades Sitimerto Adit merupakan salah figur dari keluarga yang memiliki sumber ekonomi yang sangat kuat di tingkat desa. Sementara di Desa Tanjung terdapat 3 calon, (1) Don Vito Gusbaki unggul 1477 suara, (2) Rudi Widiyanto dengan 505 suara, (3) Agus Dwi Widodo dengan 843 suara. Kepala desa terpilih Vito merupakan anak dari mantan kepala desa (Mubarok) tapi bukan merupakan calon kepala desa yang memiliki sumber ekonomi kuat. Sehingga berdasarkan data tersebut pemenang Pilkades di desa Sitimerto adalah calon nomor urut empat yakni Adit, sedangkan di desa Tanjung adalah calon nomor urut satu yakni Vito.

Karakteristik budaya lokal di kedua desa tersebut akan sangat menentukan sejauhmana pengaruh *spiritual power* dan *material power* dalam kehidupan politik pedesaan. Jika tingkat budaya politik suatu masyarakat masih rendah maka peran nilai-nilai tradisional kekuasaan Jawa dan politik uang dapat dikatakan akan relatif besar. Begitu sebaliknya, jika tingkat budaya politik suatu masyarakat relatif tinggi

maka peran nilai-nilai tradisional dan politik uang akan berkurang dalam menggerakkan masyarakat. Pembahasan budaya politik di pedesaan Indonesia yang merupakan salah satu negara berkembang yang berada dalam proses transisi demokrasi setelah hampir 32 tahun dalam rezim otoriter Orde Baru.<sup>32</sup>

Negara yang berada pada fase transisi demokrasi akan mengalami sebuah kondisi politik, yakni dimana akan saling berhadapan nilai-nilai tradisional yang melekat kental dalam elite maupun masyarakat umum dengan nilai-nilai baru yang datang seiring perkembangan pengetahuan dan teknologi. Agar memperoleh gambaran yang lebih komprehensif dan representatif tentang relasi budaya lokal dengan demokrasi, kajian ini akan membahas pula fenomena-fenomena tersebut, baik di tingkat provinsi, kabupaten, maupun desa sesuai dengan konteks penelitian ini.

Budaya lokal selalu melekat pada setiap masyarakat yang terdiri atas sejumlah individu yang hidup baik dalam sistem politik tradisional, transisional maupun modern. Institusi tradisional kebudayaan Jawa masih ikut memberi kontribusi dalam kancah politik lokal dan ikut menentukan karakter kematangan demokrasi, khususnya di pedesaan Kabupaten Kediri, seperti budaya feodalisme Jawa merupakan salah satu warisan nilai yang muncul saat ini.

Alfian menganggap bahwa lahirnya kebudayaan politik sebagai pantulan langsung dari keseluruhan sistem sosial-budaya masyarakat dalam arti luas. Hal ini terjadi melalui proses sosialisasi politik agar masyarakat mengenal, memahami, dan menghayati nilai-nilai politik tertentu yang dipengaruhi oleh sikap dan tingkah laku politik mereka sehari-hari. Adapun nilai-nilai politik yang terbentuk dalam diri seseorang biasanya berkaitan erat dengan atau bagian dari nilai-nilai lain yang hidup dalam masyarakat itu, seperti nilai-nilai sosial budaya dan agama. Alfian nampaknya

---

<sup>32</sup>Almond dan Sidney Verba, *Budaya Politik, Tingkah Laku Politik dan Demokrasi di Lima Negara* (terj. Sahat Simamora), Jakarta: Bumi Aksara, 1990, hal. 5

menempatkan faktor lingkungan budaya sebagai salah satu faktor penentu orientasi politik seseorang disamping sejumlah faktor lainnya.<sup>33</sup>

Relasi budaya lokal dengan demokrasi cukup menarik diamati di Kabupaten Kediri. Meskipun kawasan tersebut berada dalam lanskap budaya Jawa Mataraman yang sering dianggap feodal atau sering dianggap kurang demokratis. Sebagaimana yang diuraikan oleh Siti Zuhro menunjukkan Jawa Timur memiliki tiga karakteristik budaya politik lokal yang berbeda. *Pertama*, wilayah Mataraman dengan ciri masyarakatnya yang cenderung lebih nasionalis dan abangan (nominal Islam). *Kedua*, wilayah Tapal Kuda yang masyarakatnya lebih agamis dan *ketiga*, wilayah Arek yang masyarakatnya dikenal lebih egaliter dan terbuka untuk berbagai macam gagasan.<sup>34</sup> Dalam konteks penelitian ini desa Tanjung dan desa Sitimerto jika dilihat dalam perspektif budaya lokal dan demokrasi, termasuk wilayah mataraman terbagi menjadi dua kelompok besar, yakni cenderung masih memegang teguh tradisi adat Jawa atau identik dengan Islam nominal (abangan) dan kelompok yang sering berafiliasi dengan pondok pesantren cenderung mempraktikkan ajaran Islam secara ketat disebut golongan santri (Islam taat).

Siti Zuhro melanjutkan terdapat beberapa faktor yang harus disertakan dalam mengkaji demokrasi lokal diantaranya; nilai-nilai budaya lokal, faktor peran aktor lokal, dan faktor kelembagaan lokal.<sup>35</sup> Proses demokrasi lokal juga terjadi di tingkat desa, misalnya adalah pemilihan kepala desa posisinya menyentuh langsung masyarakat. Pilkades membuka ruang relasi politik masyarakat dan pemerintahan

---

<sup>33</sup> Alfian, *Politik, Kebudayaan dan Manusia Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 1985, hal. 24

<sup>34</sup> Lihat R. Siti. Zuhro, "The Impact of A Neutrality Bureaucracy in the 1999 Elections: Case Studies in East Java and South Sulawesi" dalam *Local Democracy and Bureaucratic Reform: Selected Articles* (Jakarta: The Habibie Center, 2007) dalam Nurhasanah Leni, *Demokrasi dan Budaya Politik Lokal di Jawa Timur Menurut R. Zuhro*, dkk, Jurnal TAPIs Vol.8 No.1 Januari-Juni 2012

<sup>35</sup> *Ibid.* Siti. Zuhro dkk. *Model Demokrasi Lokal (Jawa Timur, Sumatera Barat, Sulawsi Selatan dan Bali)*. Jakarta: The Habibie Center, 2011



desa, karena kepala desa terpilih adalah pusat kekuasaan utama di tingkat desa dan didukung birokrasi di desa.

Disertasi ini berusaha tidak mengulangi kajian terdahulu tentang kontestasi politik desa. Beberapa nilai kebaruan dalam studi ini, karena dilakukan dalam konteks politik lokal di desa. Menurut pandangan peneliti topik dinamika politik desa masih sangat jarang terjadi karena kebanyakan studi politik lokal lebih banyak di tingkat kabupaten/kota (Pilwali dan Pilbub) dan provinsi (Pilgub). Apalagi, belum ada studi yang cukup mumpuni mengenai pemilihan kepala desa yang menggunakan perspektif oligarki di tingkat desa. Nilai kebaruan lainnya studi ini menggunakan unit analisis teori kekuasaan Jawa dan teori oligarki untuk mengungkap konfigurasi sumber daya kekuasaan dalam pemilihan kepala desa, bagaimana konfigurasi itu dibentuk, yakni melalui efektivitas bentuk strategi penggunaan simbol kekuasaan Jawa dan strategi sumber daya kekuasaan material dalam konteks Pilkades, hal ini untuk mengungkap intensitas peran sumber daya oligarki dalam membentuk budaya politik masyarakat pedesaan dalam kontestasi politik lokal, dan memotret bentuk demokrasi di pedesaan Jawa, apakah mengalami kemajuan atau kemunduran.

## **1.2 Masalah Penelitian**

Masalah utama dalam disertasi ini terkait tema oligarki dalam kekuasaan di Pilkades. Dengan demikian, disertasi berusaha menjawab masalah utama tentang konfigurasi sumber daya kekuasaan di kedua desa (Sitimerto dan Tanjung) yang memiliki kesamaan latar belakang budaya Jawa, untuk itu disertasi ini sengaja mengambil lokasi di dua desa mempunyai akar budaya Jawa sehingga ketika mengambil dua desa dengan karakter budaya Jawa. Adapun ekspektasinya konfigurasi sumber daya kekuasaan dalam pemilihan kepala desa di dua desa hasilnya juga sama, atau mungkin juga bisa berbeda. Disertasi ini menggunakan teori kekuasaan Jawa

Moertono (1985) dan Anderson (2000) yang melihat kekuasaan dalam budaya Jawa sebagai energi sakti atau *kesakten*. Disertasi ini melakukan elaborasi bentuk-bentuk strategi politik berbasis sumber kekuasaan spiritual yang relevan dengan tesis *kesakten* oleh Moertono (1985) dan Anderson (2000) dalam kasus pemilihan kepala desa Sitimerto dan pemilihan kepala desa Tanjung tahun 2016. Dengan demikian, untuk menjadi kepala desa di kedua desa tersebut, apakah masih ada indikasi praktek *kesakten* melalui penggunaan simbol-simbol kekuasaan Jawa (misalnya, *pulung*, *semedi*, *pusaka*, dan *kesakten*) yang bersifat *spiritual power*.

Selain teori kekuasaan Jawa diatas, disertasi ini juga menggunakan teori oligarki yang menekankan keunggulan sumber daya material yang dipelopori oleh Winters (2011), Hadiz dan Robinson (2004), karena disertasi ini juga ingin menjawab apakah ada sumber daya kekuasaan lain berupa kekuasaan material dalam bentuk strategi politik uang, pembagian barang dan sebagainya atau bersifat *material power* dominan dalam pemilihan kepala desa di desa Sitimerto dan desa Tanjung. Lantas, apakah disertasi ini berujung sama dengan teoretisi utama oligarki yang menekankan dominasi sumber daya material dalam politik lokal, atau sebaliknya melakukan koreksi terhadap tesis dominan sumber daya kekuasaan material yang membentuk politik lokal sehingga disertasi ini mempunyai kebaruan akademik yang kuat dalam teori sumber daya kekuasaan. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka terdapat beberapa pertanyaan yang menjadi titik berat dalam kajian ini, diantaranya terdapat dua pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana konfigurasi dalam penggunaan sumber daya kekuasaan di pemilihan kepala desa tahun 2016 di desa Sitimerto dan desa Tanjung?

2. Mengapa intensitas peran sumber daya kekuasaan material oligarki dan sumber kekuasaan non-material *kesakten* dalam setiap dinamika pemilihan kepala desa tidak sama?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Sebagaimana rumusan masalah di atas, maka penelitian disertasi ini secara umum bertujuan untuk mendapatkan gambaran dan memahami:

1. Konfigurasi sumber daya kekuasaan yang digunakan calon kepala desa yang berkontestasi dalam politik lokal, sebagai upaya memenangkan Pilkades desa Sitimerto dan Pilkades desa Tanjung Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri.
2. Intensitas peranan sumber daya kekuasaan oligarki dan sumber daya kekuasaan Jawa dalam pemilihan kepala desa dalam menguasai politik desa,
3. Gambaran praktik politik oligarki di pedesaan dan konteks yang melatarbelakangi perbedaan intensitas peran sumber daya kekuasaan di setiap desa.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Kajian tentang politik pedesaan mempergunakan teori kekuasaan Jawa, teori elite, oligarki dan politik lokal sehingga diharapkan melihat sisi lain dari analisis sumber daya kekuasaan yang membentuk politik desa Indonesia, salah satunya elaborasi terhadap kekuasaan non-material identik dengan konsep kekuasaan Jawa dalam politik lokal. Karena analisis sumber daya kekuasaan dari perspektif kultural Jawa dan oligarki membidik politik desa masih belum ada ditemukan dalam studi terdahulu, paling tidak ini argumen awal membuat kajian mengenai desa telah

menjadikan studi sebagai obyek kajian penelitian yang menarik. Hal ini berdasarkan asumsi kajian tentang politik lokal selama ini didominasi ruang kajian skala lebih luas meliputi Pemilihan Bupati/Walikota dan pemilihan gubernur, sehingga jarang sekali tingkat mikro sekelas pemilihan kepala desa. Maka penelitian ini dilakukan untuk memperkaya kajian tentang desa dengan analisis sumber daya kekuasaan. Sebagaimana sebuah penelitian disertasi, maka penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan kontribusi besar dalam bentuk signifikansi penelitian. Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Signifikansi dari segi akademis (teoretis), penelitian ini memberikan sumbangan akademis untuk menambah variasi kajian politik desa dan pemahaman baru tentang desa dari perspektif oligarki dan perspektif kultural kekuasaan Jawa, terutama menyangkut penggunaan teori oligarki sebagai pisau analisis dan perspektif kultural melalui teori kekuasaan Jawa dalam kontestasi politik lokal di pedesaan. Selanjutnya menganalisis bentuk sumber-sumber kekuasaan politik dari aktor-aktor yang terlibat dalam proses pemilihan kepala desa serentak dari aspek *spiritual power* dan *material power*. Secara khusus kajian ini memberikan nilai manfaat terutama pembaharuan konsepsi-teoritik oligarki dan gagasan kekuasaan Jawa.
2. Signifikansi dari segi praktis, diharapkan penelitian ini memberikan manfaat bagi para pemangku kepentingan kebijakan desa, yang menjadikan kajian ini sebagai referensi informasi tambahan yang dapat memperluas keingintahuan tentang politik pedesaan, dengan memberikan gambaran kualitas demokrasi lokal dan mengeksplorasi dinamika politik desa tidak hanya dengan pendekatan kultural Jawa tetapi juga ekonomi politik. Selain itu penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada sejumlah pihak yang memiliki perhatian

pada pengembangan dan pembangunan politik di pedesaan dengan mendasarkan kepada konsep kekuasaan Jawa dan peran politik aktor-aktor yang berkepentingan dalam pemilihan kepala desa serentak.

### 1.5 Sistematika Penulisan

Dalam rangka mempermudah pembahasan dan menguraikan substansinya, riset ini penulis pilah menjadi 6 (enam) Bab, yang terdiri dari:

Bab I **Pendahuluan**, bagian ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, pentingnya penulisan, dan sistematika penulisan

Bab II **Tinjauan Pustaka**, membahas tentang penelitian yang relevan, kerangka teori meliputi *Pertama*, teori kekuasaan Jawa, Konsep ini dibutuhkan untuk memahami relasi dan sumber kekuasaan perspektif kekuasaan Jawa dan Barat yang berkembang di masyarakat pedesaan. *Kedua*, teori elite, mayoritas calon kepala desa adalah kelompok elite di masyarakat. *Ketiga*, teori oligarki, terkait kemunculan kelompok oligarki untuk memenangkan pemilihan kepala desa. *Keempat*, teori demokrasi dan Politik Lokal pedesaan. Terakhir kerangka analisis teoritik penelitian.

Bab III **Metode Penelitian**, membahas tentang pendekatan penelitian, jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data yang digunakan dalam disertasi ini.

Bab IV **Deskripsi Desa Sitimerto dan Desa Tanjung di Pilkades Serentak Kabupaten Kediri Tahun 2016**, membahas tentang wilayah Kabupaten Kediri, profil desa Sitimerto dan desa tanjung meliputi; sejarah desa, kondisi geografi dan demografi, kondisi ekonomi dan sosial budaya,

deskripsi pemerintahan desa, dan konteks politik desa Sitimerto dan desa Tanjung.

Bab V **Konfigurasi Sumber Kekuasaan Dalam Pilkades Desa Sitimerto dan Desa Tanjung Tahun 2016**, membahas dinamika pemilihan kepala desa di Indonesia. Bentuk strategi politik berbasis sumber kekuasaan spiritual meliputi; *slametan* di makam pendiri desa, jasa *pituo* berasal kiai dan dukun, menyimpan benda-benda pusaka, tanda kekuasaan berupa pulung, sistem penanggalan Jawa *petungan*, proses semedi *laku ngelmu* dan tirakat, dan garis keturunan kepala desa *luri*. Strategi berbasis sumber kekuasaan material meliputi; politik uang disebut *iciran*, pemberian barang-barang individu *sangu*, kegiatan *ngebosi* menyediakan makan-minum gratis, pemberian barang kepada komunitas-komunitas di desa *club goods*, dan jaringan birokrasi desa maupun supradesa. Bentuk Konfigurasi sumber kekuasaan di Pilkades Sitimerto dan Pilkades Tanjung. Terakhir ditutup dengan ringkasan.

Bab VI **Intensitas Peran Sumber Daya Kekuasaan Dalam Pemilihan Kepala Desa**, bab ini diawali pembahasan munculnya oligarki di Kabupaten Kediri. Selanjutnya kontestan menggunakan sumber daya material di Pilkades, kontestan menggunakan sumber daya non-material di Pilkades, dan kontestan menggunakan sumber daya simultan. Bab ini juga membahas intensitas sumber daya oligarki di pemilihan kepala desa.

Bab VII **Kesimpulan dan Implikasinya**, menguraikan tentang kesimpulan, temuan penelitian, proposisi penelitian, dan implikasi teoritis dari penelitian ini. Kesimpulan berisikan jawaban atas dua pertanyaan penelitian yang diajukan. Temuan penelitian menjelaskan tentang hubungan antara

kesimpulan dengan aspek teoretik maupun aspek empirik. Sedangkan implikasi teoritis berisikan tentang konfirmasi maupun revisi terhadap teori utama maupun teori pendukung yang digunakan dalam penelitian ini.